

The Influence of the #MeToo Movement on Socio-Political Dynamics in the MENA Region

Pengaruh Gerakan #MeToo Terhadap Dinamika Sosial Politik di Wilayah MENA

Anggi Koenjaini Putri

Center for Identity and Urban Studies

Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan pengaruh fenomena gerakan #MeToo terhadap dinamika sosial dan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Dilatarbelakangi oleh perubahan struktural yang lambat dan kontrak sosial otoriter di wilayah tersebut, gerakan #MeToo memperluas ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk mengatasi tabu budaya terkait kekerasan berbasis gender. Dengan menggunakan teori gerakan sosial penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui tiga aspek, peluang politik, struktur mobilisasi, dan pemingkiaan kultural. Hasil analisis menunjukkan bahwa gerakan #MeToo di MENA memberikan suaranya untuk perempuan dan laki-laki dalam melawan penindasan gender, mengubah norma budaya, dan menuntut reformasi kebijakan. Dengan melibatkan media sosial sebagai alat utama, untuk memicu perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual serta memberikan dorongan bagi reformasi yang lebih luas dalam hak-hak perempuan di wilayah tersebut.

Kata-Kata Kunci: Gerakan MeToo, MENA, Konstruksi Framing, Feminisme.

Abstract:

This research explains the influence of the #MeToo movement phenomenon on social and political dynamics in the MENA. Against the backdrop of slow structural change and an authoritarian social contract in the region, the #MeToo movement expanded the space for women and men to overcome cultural taboos regarding gender-based violence. With social movement theory, this research analyses this phenomenon through political opportunities, mobilisation structures, and artistic framing. The analysis results show that the #MeToo movement in MENA gives women and men a voice in fighting gender oppression, changing cultural norms, and demanding policy reform by involving social media as a critical tool to trigger a change in society's perception of sexual violence and provide the impetus for broader reform in women's rights in the region.

Keywords: MeToo Movement, MENA, Framing Construction, Feminism.

Korespodensi:

Anggi Koenjaini Putri (anggikoenjaini@gmail.com)

Pendahuluan

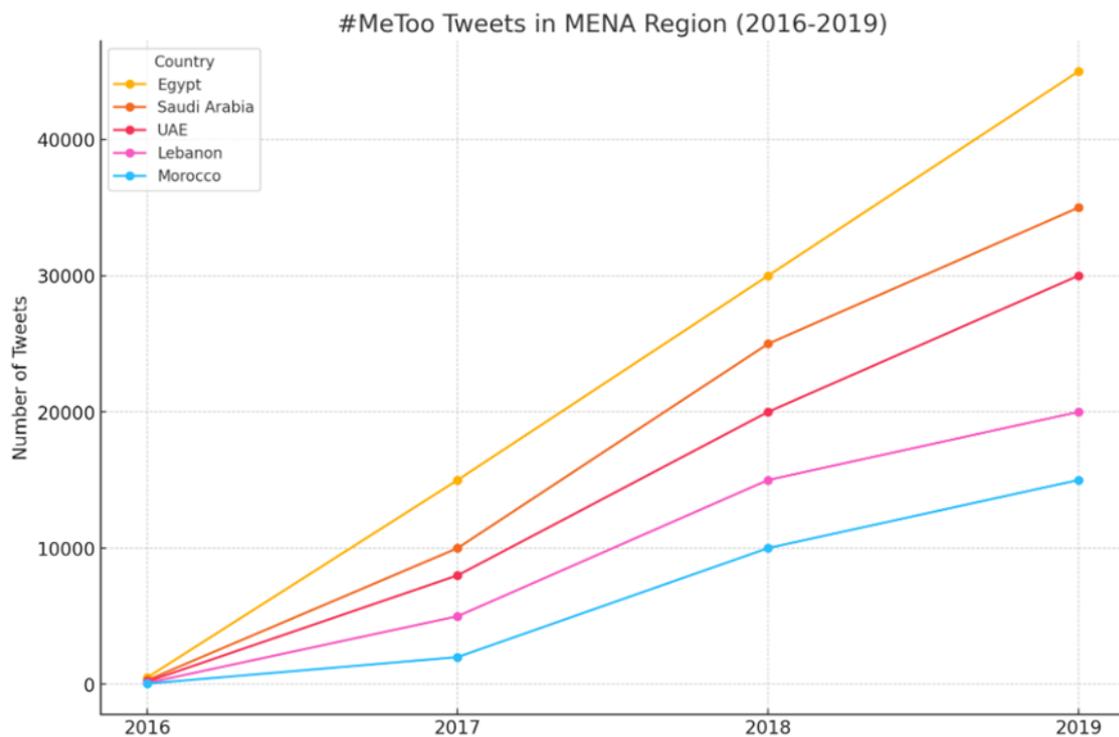
P erluasan isu gerakan sosial melalui aktivisme media sosial merupakan fenomena global kontemporer yang umum terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Gerakan Me Too, pertama kali diciptakan oleh aktivis Tarana Burke, dibentuk pada tahun 2006, dan dimaksudkan untuk mendukung para penyintas kekerasan seksual yang merupakan bagian dari komunitas yang mengalami disinvestasi dan marginalisasi sistemik—khususnya perempuan dan anak perempuan kulit hitam (Mutoka, 2023). Salah satunya kampanye global melalui hashtag yang berkembang menjadi isu global seperti fenomena meluasnya tagar #MeToo di seluruh belahan dunia. Berawal pada tahun 2017 seorang aktris Hollywood, Alyssa Milano menggunakan hashtag #MeToo untuk mendapatkan dukungan atas cerita pribadinya tentang pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja (Garcia, 2017). Gerakan #MeToo yang berkembang lewat media sosial ini telah mendapatkan dukungan dari masyarakat yang ada di berbagai negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, Amerika, dan lain-lain. Gerakan sosial Me Too di Timur Tengah dan Afrika dimotivasi oleh lambatnya perubahan struktural akibat kontrak sosial yang otoriter dan redistribusi

Perempuan di MENA telah mendorong kemajuan melalui gerakan online #MeToo yang mengartikan bahwa mereka tidak lagi diam terhadap pelecehan. Pada kasus perempuan Maroko mulai memimpin gerakan #MeToo dalam apa yang disebut sebagai kampanye Masaktach (saya tidak akan diam). Perempuan di Kuwait menjadi contoh terbaru dari banyak perempuan di kawasan yang menjadi ujung tombak gerakan untuk mengatasi pelecehan seksual. Blogger mode Kuwait, Ascia Al Faraj, mengunggah video eksplosif yang membahas masalah pelecehan di negara tersebut. Gerakan #MeToo yang muncul di Iran dan Mesir khususnya, keduanya mengarah pada pengenalan reformasi hukum dan bahkan penangkapan dan penuntutan tersangka pemerkosa. Gerakan #MeToo yang muncul di Iran dan Mesir (Sharifi M. , 2021).

Dalam masyarakat di mana struktur patriarki dikukuhkan oleh hukum, dan kekerasan seksual adalah tabu, perempuan di wilayah tersebut mendorong diskusi kritis ke ranah publik, saat wilayah tersebut melanjutkan perjuangan abadi mereka melawan kekerasan berbasis gender. *The New Arab* berbicara kepada Rothna Begum, seorang peneliti hak-hak perempuan senior di Human Rights Watch, tentang apa yang ada di depan di jalan panjang untuk mengatasi

kekerasan berbasis gender (Sharifi M. , 2021). Di negara-negara MENA seperti Iran, efek dari gerakan “#MeToo” 2017 mengguncang media sosial Iran minggu ini ketika tuduhan pemerkosaan ditujukan kepada beberapa tokoh paling terkemuka di negara itu. Gerakan tersebut, menyebabkan penangkapan setidaknya satu tersangka pemerkosa, telah memicu percakapan yang lebih luas seputar kekerasan dan pelecehan seksual—sebuah topik yang jarang dibuka secara publik di Iran yang Islami (Fathi, 2020). Resonansi internasional terkait mengenai jumlah tweet, retweet, dan suka yang terkait dengan gerakan #MeToo di berbagai negara MENA dari tahun 2016 hingga 2019 sering digunakan tagar #MeToo untuk menggambarkan kesamaan diseluruh wilayah seperti mengancam pelecehan dan kekerasan pada perempuan dan perjuangan mencapai kesetaraan. Data ini menunjukkan tingkat keterlibatan #MeToo menjadi saluran dukungan virtual bagi mereka yang berbicara, berbagi pengalaman di media sosial (UN Women, 2020).

Gambar 1. Peningkatan Tweet #MeToo di MENA



Sumber: Diolah penulis dari UN Women tahun 2020.

Data diatas menunjukkan bahwa gerakan #MeToo telah mendapatkan momentum yang signifikan di wilayah MENA dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah tweet setiap tahun mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan

keterlibatan masyarakat dalam isu-isu kekerasan dan pelecehan seksual, serta semakin banyak orang yang berani berbagi pengalaman dan mendukung gerakan ini secara terbuka di media sosial. Mesir dan Arab Saudi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yang mencerminkan efek gerakan ini dalam mengangkat isu-isu yang sebelumnya mungkin tabu untuk dibicarakan di wilayah tersebut.

Secara umum, budaya berdasarkan sistem kehormatan yang menghambat anggota masyarakat MENA dari menantang praktik sosial yang ada di masyarakat. Di Mesir misalnya, masalah ketidakadilan warisan sangat akut, kebiasaan sosial membuat perempuan tidak menuntut hak warisan mereka, sebuah pengingat penting bahwa tradisi tidak diubah oleh perubahan legislatif yang dibuat di ibu kota (Hussein, 2016). Untuk mengekspos "kemalangan atau kekurangan pribadi seseorang di depan umum, atau bahkan secara pribadi", melanggar kode kehormatan. #MeToo memberikan ruang aman bagi perempuan dan laki-laki di kawasan untuk mulai mengatasi tabu budaya ini (Harod, 2019). Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana fenomena dari gerakan #Metoo mempengaruhi dinamika MENA dalam sisi sosial dan politik, studi ini akan dianalisis menggunakan teori gerakan sosial dari tulisan McAdam, McCarthy, dan Zald.

Faktor Perkembangan Gerakan Sosial

Dalam tulisan McAdam, McCarthy, dan Zald (2004) dalam bukunya yang berjudul "Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framings", menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor dalam mengkaji dan menganalisis tentang perkembangan gerakan sosial, yaitu: (1) Struktur peluang-politik; (2) Struktur mobilisasi (Mobilizing structures); dan (3) Pembingkai kultural (Cultural framing) (McAdam et al., 2004).

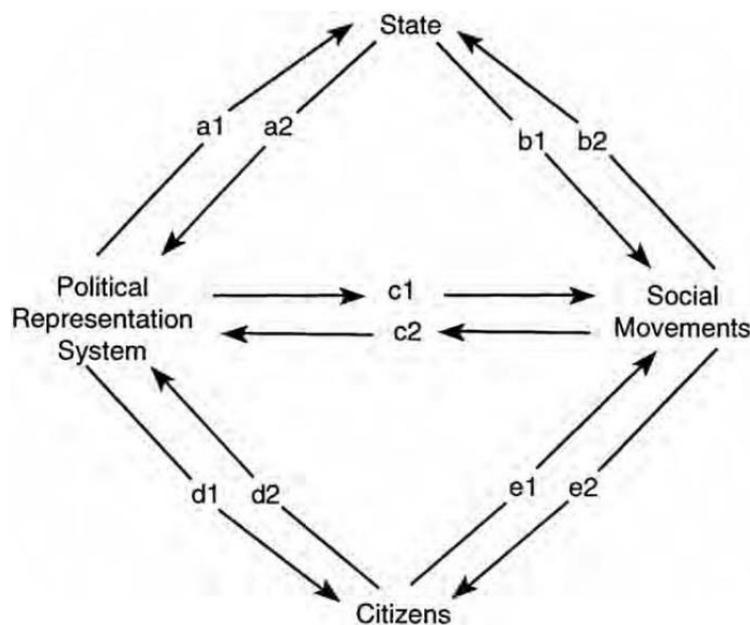
Political Opportunities

Proses politik mengacu pada keadaan ketika sekelompok orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok. Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-

organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010). Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok masyarakat untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua Gerakan Sosial merupakan perjuangan untuk melawan penindasan atau dominasi atas suatu kekuasaan sosial dan politik (Sukmana, 2016).

Dalam upaya memahami interaksi antara gerakan sosial dan peluang politik J.Craig Jenkins dan Bert Klandermans menguraikan skema interaksi hubungan negara dengan gerakan sosial pada gambar 1. panah a dan b mengacu pada hubungan warga negara dengan sistem representasi politik, terutama kepentingan formal negara. Pada penekanan utama panah b, c, dan e merupakan dampak protes sosial dan upaya gerakan terhadap sistem politik dan, dampak dari sistem politik terhadap gerakan sosial (Jenkins & Tarrow, 2005).

Gambar 2. Skema Hubungan Negara dengan Gerakan Sosial



Sumber: Jenkins & Tarrow (2005)

Pada gambar 2. kombinasi panah b1 dan c1 merupakan dampak negara dan sistem representasi politik terhadap gerakan sosial. Pertanyaan yang dimunculkan pada bagian ini adalah Bagaimana peluang politik membentuk kemunculan dan perkembangan gerakan sosial? Bagaimana tujuan dan taktik gerakan dibentuk oleh ideologi, strategi, dan gaya kebijakan para pengelola negara? Pada panah b2 dalam kaitannya dengan hubungan langsung gerakan

sosial dengan negara. memunculkan pertanyaan apakah gerakan sosial merupakan agen utama perubahan politik? dan Bagaimana mengukur "kesuksesan" gerakan sosial?. Apakah dengan mengukur hal ini dapat melihat tujuan dan agenda spesifik para aktivis atau dengan melihat dampak dari tindakan mereka?. Sehingga dengan mengkaji pertanyaan mengenai akses politik dan penetapan agenda serta perolehan kebijakan tertentu dapat memperluas kerangka ini untuk memasukkan perubahan struktural dalam sistem negara itu sendiri serta perubahan dalam sistem politik secara keseluruhan (Jenkins & Tarrow, 2005).

Dampak gerakan sosial terhadap sistem representasi politik pada panah c2 menjelaskan bahwa gerakan sosial sering kali menghasilkan isu-isu dan ide ide yang dimasukkan ke dalam kebijakan publik. Pada panah e1 dan e2 gerakan sosial dapat mempunyai dampak tidak langsung terhadap sistem politik dengan membentuk sikap dan tindakan warga negara. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan kemampuan gerakan sosial untuk memobilisasi dan mengubah orientasi masyarakat (Jenkins & Tarrow, 2005).

Mobilizing Structures

Konsep mobilisasi (mobilization) berangkat dari konsep Jenkin (Dieter Opp, 2009) yang menjelaskan tentang konsep mobilisasi dimana proses kelompok mengamankan kontrol kolektif atas sumberdaya yang diperlukan untuk suatu tindakan kolektif. Selanjutnya McCarthy dan Zald memperluas konsep mobilisasi, yang menyatakan bahwa mobilisasi adalah mengacu kepada berbagai aktivitas dari suatu organisasi gerakan sosial atau aktor individual untuk mendapatkan kontrol atas barang-barang yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan tujuan dari organisasi gerakan atau aktor individual (Dieter Opp, 2009).

Peluang politik dan mobilisasi sering diciptakan oleh jarak budaya dan munculnya kontradiksi lama yang tidak aktif yang membingkai ulang keluhan dan ketidakadilan dan kemungkinan tindakan. Terkadang jarak ini adalah peristiwa perilaku yang menyusun kembali atau menantang definisi situasi yang berlaku, sehingga mengubah persepsi biaya dan manfaat kebijakan dan program dan persepsi ketidakadilan status quo. Kontradiksi budaya terjadi dan mengarah ke mobilisasi ketika dua atau lebih tema budaya yang berpotensi bertentangan dalam kontradiksi peristiwa, atau ketika realitas perilaku dipandang secara

substansial berbeda dari pembenaran ideologis untuk gerakan. Gerakan hak-hak sipil modern tumbuh dari upaya untuk membongkar segregasi di lembaga-lembaga publik dan hukum. Struktur mobilisasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan gerakan sosial. McAdam, McCarthy, dan Zald menekankan bahwa kemampuan sebuah gerakan untuk memobilisasi sumber daya dan anggota secara efektif dapat menentukan sejauh mana gerakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas struktur mobilisasi meliputi: (1) Kohesi Internal, yakni tingkat solidaritas dan kerjasama di antara anggota gerakan; (2) Fleksibilitas Organisasional, kemampuan gerakan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal; (3) Kapasitas Mobilisasi, Kemampuan untuk menarik dukungan dari berbagai sumber, termasuk publik umum, organisasi pendukung, dan sumber daya eksternal.

Dalam buku mereka, McAdam, McCarthy, dan Zald juga menyajikan berbagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana struktur mobilisasi berfungsi dalam berbagai konteks gerakan sosial. Misalnya, mereka membahas peran organisasi formal dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan bagaimana jaringan sosial memainkan peran penting dalam gerakan lingkungan di Eropa. Struktur mobilisasi merupakan komponen kunci dalam analisis gerakan sosial. Dengan memahami bagaimana gerakan sosial mengorganisir sumber daya dan anggotanya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang dinamika internal gerakan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Karya McAdam, McCarthy, dan Zald memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis struktur mobilisasi dan menyoroti pentingnya organisasi, jaringan sosial, kepemimpinan, dan sumber daya dalam membentuk dan mengarahkan gerakan sosial.

Cultural Framing

Gerakan sosial dalam konteks masyarakat yang lebih luas memanfaatkan persediaan budaya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang merupakan ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap apa yang terjadi. Misalnya, ungkapan yang populer dalam gerakan perempuan, "Tubuh perempuan adalah miliknya sendiri," membingkai suatu masalah dan menyarankan arah kebijakan bagi perempuan terkait dengan kebijakan aborsi dan lembaga medis. Namun hal ini hanya masuk akal dalam wacana budaya yang menyoroti gagasan tentang otonomi individu dan persamaan hak

kewarganegaraan: otonomi karena fokus pada pilihan individu, kesetaraan karena menganggap perempuan adalah warga negara yang setara. Hal ini tidak masuk akal dalam masyarakat di mana sebagian besar orang, laki-laki dan perempuan, adalah budak, atau diyakini sebagai anggota keluarga atau kolektif. Hal ini tidak masuk akal dalam masyarakat di mana perempuan secara umum dan sah dianggap bergantung pada, pertama, ayah, dan kedua, suami. Pembungkahan ketidakadilan dan tujuan politik saat ini hampir selalu mengacu pada definisi masyarakat yang lebih luas mengenai hubungan, hak, dan tanggung jawab untuk menyoroti apa yang salah dengan tatanan sosial saat ini, dan untuk menyarankan arah perubahan. Gerakan sosial memanfaatkan kekayaan budaya yang lebih besar tidak berarti bahwa semua gerakan sosial mempunyai akses yang sama terhadap kebudayaan tersebut. Gerakan sosial, pemimpinnya, dan partisipannya ditempatkan secara berbeda dalam struktur sosial. Dengan demikian, mereka memanfaatkan repertoar dan kerangka yang tersedia dan sesuai dengan keterampilan, orientasi, dan gaya kelompok yang membentuknya.

Pada proses konstruksi yang terjadi di berbagai arena terdapat kompetisi eksternal dan internal untuk menentukan situasi dan apa yang harus dilakukan. Secara eksternal, para aktivis dan pemimpin gerakan menentang pihak berwenang dan mereka terlibat dalam perdebatan dengan para aktivis dan pemimpin gerakan tandingan. Gerakan dan gerakan tandingan tidak hanya terlibat dalam kontes mobilisasi untuk menunjukkan siapa yang mempunyai dukungan dan sumber daya paling besar, mereka juga terlibat dalam kontes pembungkahan yang mencoba meyakinkan pihak berwenang dan orang-orang di sekitar mengenai kebenaran perjuangan mereka.

Dalam proses ini media dipandang tidak netral, karena cenderung menggunakan retorika dan gambaran yang berbeda-beda, untuk menampilkan arti-penting dan intensitas suatu isu. Misalnya, gambaran janin yang diaborsi di televisi mempunyai dampak yang berbeda dibandingkan dengan membaca tentang aborsi di surat kabar. Media berbeda dalam kemampuannya menyampaikan informasi, membangkitkan respons emosional, mendramatisir peristiwa, dan memusatkan perhatian. Karena media juga merupakan bagian dari konteks budaya yang lebih besar, proses seleksi ini akan dibentuk oleh masyarakat yang lebih luas dimana mereka menjadi bagiannya. Misalnya, Hallin dan Mancini (1984) menunjukkan bagaimana TV Italia dan Amerika menyajikan

liputan yang sangat berbeda karena perbedaan bentuk presidensial dan representasi di kedua negara. Terlebih lagi, media massa mempunyai rutinitas produksi dan dinamika organisasi yang mengarahkan mereka untuk melakukan lebih dari sekedar menyebarkan informasi; mereka mengubahnya. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi kapitalis, media tidak hanya “melaporkan berita” tetapi juga harus menanggapi keinginan pemilik atau pengontrolnya dan permintaan pasar. Karena minat masyarakat terhadap berita meningkat dan berkurang, para aktivis mengembangkan strategi untuk mendorong media agar meliputnya (Ryan, 1991). Kapanpun sebuah gerakan tertentu telah menyediakan stok media sosial yang ada, namun seiring berjalannya waktu, stok tersebut berubah, sehingga mempengaruhi potensi pembingkai. Perubahan dalam teknologi perkembangan surat kabar, munculnya radio, pertumbuhan televisi, perkembangan satelit, penyebaran kamera video genggam, masing-masing mengubah potensi untuk membingkai tuntutan dan ketidakadilan gerakan .

Pada penelitian ini digunakan metodologi kualitatif-deskriptif dengan meneliti studi kasus secara menyeluruh dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah teknik analisis data kualitatif dengan proses analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan tahap akhir analisis konsep dan teori yang dielaborasi dengan data yang ada. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Soerjasih, Kinasih, Anggaunitakiranantika, & Haryono, 2017). Menurut Creswell, terdapat beberapa proses dalam analisis data kualitatif, pertama tentunya pengumpulan data, melalui studi pustaka. Kedua, pengetikan data dan teks, melakukan penulisan data peruba paragraf dan menghimpun menjadi paragraf dengan teknik paraphrase jika data berasal dari studi pustaka sekunder. Ketiga membaca keseluruhan teks, dengan melakukan screening data yang telah didapat selanjutnya. Keempat, koding dan klasifikasi atau melakukan pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam indikator yang sudah dibuat sesuai kategori yang lebih spesifik untuk selanjutnya masuk dalam tahap analisis. Kelima, deskripsi, pola, dan tema (analisis) melakukan penafsiran dan analisis dari data yang telah dikelompokkan sesuai kategori dengan konsep dan teori yang ada sehingga akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah (Soerjasih, Kinasih, Anggaunitakiranantika, & Haryono, 2017).

Tipe penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Tujuannya untuk mengkaji suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait realita yang penulis temukan yang dibawakan dalam bentuk naratif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik dan signifikan dalam menyelesaikan suatu rumusan masalah dengan batasan yang jelas serta dibantu dengan kelengkapan studi pustaka (Soerjasih, Kinasih, Anggaunitakiranantika, & Haryono, 2017). Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial politik dari gerakan Metoo di kawasan negara-negara Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka/kepustakaan (library research) yang berupa data atau dokumen yang tertulis. Jangkauan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 – 2018 pada awal kemunculan gerakan Metoo melalui #Metoo di media sosial pada tahun tersebut fenomena tersebut berhasil mendorong orang-orang maupun komunitas berbasis gender untuk menyuarakan keberanian melawan pelecehan seksual. Bagi negara dengan MENA gerakan tersebut merupakan momentum peluang politik untuk mereformasi kebijakan yang selama ini masih mengabaikan hak-hak perempuan ataupun korban pelecehan seksual.

Gerakan Me too dan Kontradiksi Feminisme

Feminisme di dunia Arab merupakan konsep yang rumit. Agama dan budaya memainkan peran penting dalam persepsi tentang apa artinya menjadi seorang wanita atau pria, dan dalam menentukan konsekuensi dari diskriminasi gender. Dalam sebuah wawancara, penulis, penyair, dan feminis Lebanon Joumana Haddad dalam salah satu bukunya, *Superman Is an Arab*, mengeksplorasi efek korosif dari budaya macho dan sikap patriarki terhadap perempuan dan laki-laki di MENA (Haddad, 2012). Dalam wacana publik dan memori budaya, online maupun di forum lain, perempuan Arab masih sering dikucilkan, “diorientasikan”, dan “dibedakan” dalam diskusi Barat tentang kehidupan dan hak-hak mereka. Seperti yang diamati Carsten Niebhur, “perempuan Arab tampaknya sebebaskan dan sebahagia perempuan Eropa”. Fokusnya terlalu sering pada apa yang mereka kenakan (apa yang pantas atau tidak) dan perbedaan mereka dari wanita "Barat". Kenyataannya, bahwa di era digitalisasi global, batas-batas antara Timur dan Barat, Arab dan Eropa, menjadi

kabur sampai-sampai banyak yang khawatir identitas dan budaya Arab akan dimasukkan oleh “Amerikanisasi” (Ghazal, 2021).

Untuk lebih lanjut perlu ditelusuri gerakan akar feminitas di masa lalu Feminis wanita di MENA yang dikenal dengan nama feminis Arab Huda Shaarawy (Mesir 1879–1947), May Ziade (Libanon-Palestina 1886–1941), Anbara Salam Khalidi (Lebanon 1897–1986), Nabawiyya Musa (Mesir 1886–1951). Perempuan-perempuan tersebut, mereka sebagai pionir yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan, mempertaruhkan reputasi mereka, mata pencaharian mereka, dan hidup mereka. Namun perempuan-perempuan tersebut sering terabaikan sejarah perjuangan dan perlawanan mereka (Ghazal, 2021). Salah satu tokoh kontroversial masih berjuang untuk membuat suara perempuan didengar dan dianggap serius adalah Nawal Al Saadawi, novelis, dokter, dan feminis. Al Saadawi dalam perjuangan telah dipenjara, diasingkan, dan menjadi target ancaman pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun 2015, dalam sebuah wawancara, Al Saadawi mengatakan “Anda tidak dapat memiliki revolusi tanpa wanita. Anda tidak dapat memiliki demokrasi tanpa perempuan. Anda tidak dapat memiliki kesetaraan tanpa wanita” (Saadawi, 2011).

Gerakan #MeToo dengan kata-kata Arab #AnaKaman atau #AnaAydan, sejumlah besar muncul dari Mesir. Dalam jajak pendapat 2017 oleh Thomson Reuters Foundation, Kairo diperingkatkan sebagai “kota besar paling berbahaya bagi wanita dari daftar 19 kota PBB”. Banyak perhatian telah diberikan pada prevalensi pelecehan seksual di Mesir selama protes Lapangan Tahrir, yang mengarah pada kesadaran publik dan sosial yang lebih besar akan masalah endemik (Thomson Reuters Foundation, 2017).

Di wilayah MENA lainnya, tweet feminis dan jurnalis Mesir-Amerika Mona Eltahawy dengan tagar #MosqueMeToo adalah wahyu bagi kesadaran publik (Amidi, 2018). Dia membuat tweet “Saya telah berbagi pengalaman saya diserang secara seksual selama haji pada tahun 1982 ketika saya berusia 15 dengan harapan bahwa itu akan membantu sesama wanita Muslim memecah keheningan dan tabu seputar pengalaman pelecehan/pelecehan seksual mereka selama haji/Umrah atau di tempat-tempat suci. Ayo gunakan #MosqueMeToo” (Eltahawy, 2018).

Seruan publik diselenggarakan oleh kelompok Hak-Hak Perempuan Lebanon, Resource Centre for Gender Equality (ABAAD), untuk menyoroti

kebutaan publik terhadap pemerkosaan dan penyerangan seksual di Lebanon (Ghazal, #ANAKAMAN – METOO IN THE ARAB WORLD A journalist's account, 2021). Terinspirasi oleh Gerakan #MeToo, kelompok tersebut melakukan kampanye, #ShameOnWho, yang berlangsung selama beberapa minggu pada November 2018 untuk mengatasi stigma sosial dan menyalahkan korban “Kami mencoba mendorong perempuan yang selamat dari pemerkosaan untuk berbicara, untuk mendapatkan keluar dari siklus dan budaya menyalahkan korban”, kata pendiri kelompok tersebut, Ghida Anani (Ghazal, 2019).

Mengambil contoh dari Turki, pada Januari 2018, sebuah kampanye yang disebut #BenDeNevin (#MeTooNevin) (Harod, 2019) menjadi online dan menyebabkan demonstrasi publik di Istanbul untuk memprotes penegakan hukuman penjara seumur hidup untuk NevinYıldırım. Pada tahun 2012, Yıldırım secara brutal membunuh seorang pria yang berulang kali memerkosa dan kemudian memerasnya dengan foto telanjang. Dia hamil dari salah satu pemerkosaan dan berusaha mengembalikan kehormatannya dengan membunuhnya. Kasusnya memicu perdebatan di seluruh Turki tentang kekerasan terhadap perempuan serta aborsi dalam kasus pemerkosaan (Daily Sabah, 2018).

Gerakan #MeToo telah mendapat dukungan kasus-kasus serupa lainnya, memperluas dan memperkuat prinsip dasar dan kekuatan pendorong gerakan. Ajakan bertindak sederhana ini adalah akibat langsung dari jutaan cerita pelecehan seksual yang telah dibagikan sebagai bagian dari gerakan #MeToo. Pertanyaan paling relevan yang diangkat oleh gerakan #MeToo berpusat pada sulitnya mengubah norma dan persepsi masyarakat yang terus menghambat jalannya keadilan. Di Iran pasca-revolusi, sebuah narasi telah menyebar ke berbagai elemen di Iran masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, media, sistem pendidikan, dan bahkan dalam keluarga. Narasi ini mengisyaratkan bahwa tidak mengenakan hijab berpotensi merangsang seksualitas laki-laki dan sebagainya hijab melambangkan kesopanan dan kebajikan bagi wanita Iran. Konsekuensinya, aturan-aturan ini (hijab, alkohol) telah tertanam kuat sebagai tindakan perlindungan terhadap risiko kekerasan seksual. Memang benar bahwa perempuan yang berpakaian provokatif menyetujui hubungan seksual telah menjadi hal yang unik bentuk hijab di Iran, dan banyak perempuan di Iran yang telah menginternalisasikan bentuk hijab tertentu (hijab yang 'pantas') dan

norma perilaku sebagai cara untuk mencegah pelecehan dan penyerangan seksual (Willows, 2018); (Joshua, 2024). Analisis Bourdieus menambahkan perspektif kritis dengan mempertimbangkan cara reproduksi norma-norma ini dilegitimasi undang-undang bergantung pada kebiasaan (Bourdieu, 1987); (Joshua, 2024).

#MeToo telah berkembang menjadi kampanye media sosial feminis interseksional yang unik, menyerukan pembagian kesaksian pelecehan dan penyerangan seksual kepada publik untuk menggambarkan pengalaman umum kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang pada akhirnya permohonan keadilan, bukan pemberlakuannya," (Rachidi, 2018) dan menuntut pergeseran norma budaya yang melanggengkan ketidaksetaraan gender, yang dipraktikkan oleh semua gender. Hal ini adalah upaya global untuk mengekspos perilaku sehari-hari terhadap, dan perlakuan buruk yang sedang berlangsung terhadap perempuan, dan untuk menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku kesalahan. Lebih lanjut, #MeToo memaparkan bagaimana reformasi kebijakan yang memperluas hak-hak politik, sipil dan ekonomi kepada perempuan tidak mempengaruhi perilaku sosial budaya yang negatif terhadap perempuan (Harod, 2019).

Konstruksi Framing Gerakan Me Too di MENA

Gerakan #MeToo menjadi hastag bersifat emansipasi bahwa keterjangkauan media sosial memungkinkan dan memberdayakan berbagai ruang privat sebagai potensi bagi suara-suara yang terpinggirkan untuk menciptakan ruang publik alternatif. Sebaliknya Gerakan #MeToo di Iran menghubungkan hal-hal pribadi dengan hal di publik menghadapi narasi misoginis yang berusaha membungkam melalui praktik suara memermalukan atau ancaman dipermalukan. Kekuasaan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang tidak terlihat dan seringkali tidak disadari atau dipertanyakan melalui keterlibatan orang-orang yang menjadi sasarannya (Joshua, 2024). Hal ini ditentukan oleh hubungan antara mereka yang menjalankan kekuasaan dan mereka yang menerimanya sebagai sah (Bourdieu, 1997); (Swartz, 1997). Kekuatan simbolik melibatkan kapasitas untuk mempengaruhi dengan membentuk kekuatan bersama representasi dunia (Wacquant & Akçaoğlu, 2016). Hal ini mencakup kemampuan untuk membangun, melestarikan, atau mengubah dunia dengan menyebarkan bingkai simbolik dan kolektif instrumen

yang membentuk konstruksi kognitif masyarakat terhadap realitas (Wacquant & Akçaoğlu, 2016).

Seperti di wilayah MENA lainnya, media sosial telah menjadi platform yang digunakan para aktivis Aljazair untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu berbasis gender. Sebagian besar wacana dan perhatian publik adalah pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik. Setelah gerakan #Metoo menjadi terkenal di Amerika Serikat, upaya serupa juga muncul di Timur Tengah. Gerakan #Notyourhabibti (Palestina), #AnaKaman (Mesir), #EnaZeda (Tunisia), #Masaktach (Saya tidak akan diam—Maroko), dan #LanAsket (Saya tidak akan diam—Kuwait) adalah beberapa dari sedikit gerakan yang terjadi - kampanye yang melanda negaranya masing-masing dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan menyuarakan keprihatinan mereka (Benamara, 2023). Beberapa institusi di wilayah ini juga mengambil bagian dalam meluncurkan kampanye mereka sendiri untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam wacana publik. Kelompok Gender Regional PBB di Negara-negara Arab memulai kampanye #Ismaani (Dengarkan Aku) untuk “mendorong perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut untuk menyoroti kasus-kasus pelecehan dan pelecehan seksual” (UN Women, 2019). American University of Beirut meluncurkan #Mesh_Besita (Tidak Baik) untuk memicu perdebatan tentang kurangnya perlindungan terhadap pelecehan seksual di kawasan MENA. Semua gerakan ini dipuji sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual yang meluas dan lazim di MENA (Benamara, 2023).

Di Turki yang turut bergabung dalam kampanye “#metoo” dan banyak orang menceritakan di media sosial apa yang telah mereka alami. Terdapat beragam pendapat karena sebagian orang berpendapat bahwa laki-laki juga harus dilibatkan dalam diskusi, baik sebagai pelaku maupun, dalam beberapa kasus, korban penyerangan (Yaman, 2018). #MeToo bukan sekadar mengungkapkan preferensi, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai. Namun Hal ini juga berkaitan dengan transformasi preferensi, keyakinan, dan nilai-nilai – yang terjadi di pihak pelaku, namun juga relevan di pihak korban. Setiap gerakan sosial membantu mengubah preferensi, keyakinan, dan nilai-nilai. Hal ini memberikan pencerahan baru pada pengalaman masa lalu. Tidak hanya menimbulkan penilaian yang sudah ada sebelumnya, namun juga menghasilkan

sesuatu yang dapat dipahami. Salah satu inti dari pencapaiannya #MeToo adalah mengubah rasa malu dan malu menjadi rasa bermartabat (Sunstein, 2021).

Menyusul serangkaian serangan seksual di Maroko yang menarik perhatian nasional, kampanye media sosial baru melanda negara tersebut dengan tagar #Masaktach, yang berarti "Saya tidak akan diam," yang digambarkan oleh para ahli sebagai pengulangan gerakan #MeToo di Maroko. Zineb Belmkaddem, salah satu penyelenggara #Masaktash, mengatakan para pemimpin bertujuan untuk mendorong perempuan Maroko untuk bersuara melawan segala bentuk ketidaksetaraan (Vogelstein, *Women This Week: Morocco's #MeToo Moment*, 2018). Norma-norma sosial deskriptif, yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang, sangatlah penting. Jika hal-hal lain dianggap sama, orang akan lebih mungkin mengubah perilaku mereka untuk mematuhi suatu norma jika mereka yakin bahwa sebagian besar orang patuh, dan kecil kemungkinannya untuk melakukan hal tersebut jika mereka yakin bahwa sebagian besar orang lain tidak patuh. Gerakan #MeToo tampaknya mendapat manfaat dari pergeseran norma deskriptif, yang menunjukkan bahwa berbicara atau menolak bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan perilaku yang biasa dilakukan (Sunstein, 2021).

Momen Metoo di media Mesir menyoroti bagaimana perempuan menggunakan tagar #MeToo untuk bersuara menentang pelecehan seksual, serta bahaya yang ditimbulkannya dan kegagalan gerakan tersebut (Eltantawy, 2019). Teknologi digital telah memainkan peran penting dalam perjuangan melawan pelecehan seksual di Mesir, memungkinkan para aktivis untuk membuka debat publik, memberikan ruang kesaksian bagi para penyintas, dan memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan di lingkungan mereka. Pada periode pra-revolusi, media massa, platform media sosial, dan blog politik memungkinkan para aktivis untuk menghadapi topik yang selama ini dianggap tabu, sehingga membuka jalan bagi aktivisme untuk berkembang menjadi empat. Selama periode revolusi, mengingat peluang politik yang diberikan oleh kegagalan proses politik, media sosial berfungsi sebagai kendaraan untuk ekspansi besar-besaran dalam aktivisme, yang memungkinkan para aktivis untuk menghasut aksi publik dan mengubah konsepsi populer mengenai masalah tersebut. Sejak akhir revolusi, media sosial terus memainkan peran penting dalam menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya negara untuk mengakhiri atau mengkooptasi aktivisme dan mengambil kendali atas narasi

seputar pelecehan seksual, masyarakat Mesir tidak bisa dan tidak akan bisa dibungkam. Aktivisme digital #MeToo di Mesir telah menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih menjadi masalah yang tersebar luas di negara tersebut dan bahwa warga negara memiliki kemauan dan keinginan untuk mengambil tindakan meskipun tidak ada tindakan pemerintah yang memadai. Aktivisme anti-pelecehan seksual selama lebih dari 15 tahun terakhir menyoroti kemungkinan-kemungkinan yang mendorong perubahan sosial dan politik secara luas ketika warga negara dan masyarakat sipil diberikan ruang dan alat untuk terlibat dalam proses perubahan (Abdelmonem, 2023).

Tabel 1. Produk Framing dari Gerakan MeToo di MENA

Negara	Hashtag pada Kampanye	Tujuan dan Fokus	Karakteristik Khas	Persepsi di Masyarakat
Iran	#MeToo	Menghubungkan hal-hal pribadi dengan hal-hal publik untuk menghadapi narasi misoginis	Menghadapi ancaman suara memperlukan atau dipermalukan	Kesadaran akan kekuasaan simbolik yang tidak terlihat dan pengaruhnya terhadap masyarakat
Aljazair	#MeToo	Meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu berbasis gender	Penggunaan media sosial untuk wacana publik tentang kekerasan dan pelecehan seksual	Peningkatan kesadaran tentang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik
Mesir	#AnaKaman	Menggunakan teknologi digital untuk membuka debat publik tentang pelecehan seksual	Media sosial dan platform digital sebagai alat untuk menghasut aksi publik dan	Teknologi digital membuka jalan bagi aktivisme melawan pelecehan seksual, mengubah

			menunjukkan kesediaan warga untuk bertindak	konsepsi populer mengenai masalah tersebut
Tunisia	#EnaZeda	Menyuarakan pengalaman pelecehan seksual	Kampanye yang melanda negara dan melibatkan banyak institusi	Peningkatan kesadaran dan diskusi publik tentang pelecehan seksual
Maroko	#Masaktach	Mendorong perempuan untuk bersuara melawan ketidaksetaraan	Mengubah norma deskriptif, meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual	Mengubah norma sosial deskriptif, mendorong perempuan untuk bersuara melawan ketidaksetaraan
Kuwait	#LanAsket	Kesempatan bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan menyuarakan keprihatinan	Kampanye publik untuk melawan pelecehan seksual	Meningkatnya kesadaran dan diskusi publik tentang pelecehan seksual
Regional (Negara Arab)	#Ismaani	Mendorong perempuan dan laki-laki untuk menyoroti kasus pelecehan seksual	Kampanye oleh kelompok Gender Regional PBB di Negara-negara Arab	-
Lebanon	#Mesh_Besita	Memicu perdebatan tentang kurangnya perlindungan terhadap pelecehan	Diluncurkan oleh American University of Beirut untuk meningkatkan kesadaran	

		seksual		
Turki	#MeToo	Meningkatkan kesadaran tentang pengalaman pelecehan seksual dan pentingnya inklusi laki-laki dalam diskusi	Beragam pendapat mengenai partisipasi laki-laki sebagai pelaku dan korban	Transformasi preferensi, keyakinan, dan nilai-nilai, serta mengubah rasa malu menjadi rasa bermartabat

Sumber: Dikelola oleh Penulis dari berbagai Sumber

Peluang Perubahan Politik di MENA

Gerakan #MeToo Di MENA dalam tindakannya memberontak terhadap pemerintah, tidak hanya dilakukan perempuan dan laki-laki gerakan #MeToo bersatu berdasarkan pengalaman yang sama atau umum dan memberontak terhadap praktik dan juga terhadap institusi beberapa di antaranya pemerintahan. Seperti di Lebanon, gerakan #MeToo mengecam kelambanan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang melibatkan pejabat publik. Hal ini mendorong pengunduran diri beberapa pejabat dan tuntutan reformasi sistem peradilan (Aljazeera, n.d). Pada tahun 2019, Tunisia meloloskan undang-undang baru yang mendefinisikan pelecehan seksual dan kriminalitas pelecehan seksual online (Aljazeera, 2021). Ditahun yang sama, 2019, Mesir membentuk komite nasional untuk memerangi pelecehan seksual dan meluncurkan hotline nasional untuk pelaporan pelecehan seksual (Farouk, 2020).

Di Arab, seperti Kerajaan Arab Saudi sedang menjalani reformasi besar-besaran untuk memberi perempuan lebih banyak kekuasaan atas keuangan dan nasib mereka. Reformasi tersebut mengirimkan pesan penting tentang pembebasan perempuan ke negara-negara Islam lainnya yang mengikuti sikap Kerajaan. Pengaruh Arab Saudi di wilayah tersebut digarisbawahi dengan menjadi penjaga atau penjaga situs paling suci, Mekah (Mekah) dan Madinah (Madinah). Selain itu, kelonggaran ditunjukkan kepada pemerkosa yang menikahi korbannya; bahwa undang-undang sedang berubah di beberapa negara. Di Maroko, Pasal 475 KUHP sebelumnya mengizinkan pemerkosa yang

menikahi korbannya untuk menghindari penuntutan. Undang-undang ini dicabut pada tahun 2014 ketika seorang korban bunuh diri setelah dia dipaksa menikahi pemerkosanya (BBC, 2014). Lebanon dan Yordania juga mereformasi kode hukum mereka pada tahun 2017.

Di Kerajaan Hashemite Yordania, 63 organisasi hak-hak perempuan meluncurkan kampanye media sosial pada tahun 2016 melobi anggota dewan untuk menghapuskan Pasal 308 KUHP (Sadek, 2017). Pada musim panas 2017, Parlemen Yordania mencabut ketentuan KUHP yang memungkinkan pemerkosa untuk lolos dari hukuman dengan menikahi korbannya. Tahun tersebut, pemerintah Yordania melaporkan 36 pembunuhan demi kehormatan yang dibenarkan (Miller, 2018) yang mengarah ke amandemen KUHP yang sebelumnya telah menetapkan hukuman yang lebih ringan untuk kejahatan yang dilakukan dengan "fits of fury", pembunuhan demi kehormatan biasanya terjadi dalam keluarga, ketika anggota keluarga laki-laki membunuh saudara perempuan atau anak perempuan mereka karena membawa "ketidakhormatan" pada keluarga. Reformasi legislatif Tunisia, yang dilaksanakan pada tahun 2017, adalah yang paling progresif di kawasan ini, Tunisia mewajibkan kompensasi dan dukungan tindak lanjut bagi para penyintas, sambil mengakui bahwa laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan (UN Women, n.d.).

Sejak gerakan #MeToo di Iran, adalah persetujuan baru-baru ini atas 58 pasal RUU untuk melindungi perempuan di negara itu dari kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. RUU tersebut disambut baik sebagai tanda atas nama pemerintah yang mengedepankan mekanisme perlindungan bagi perempuan. Di sisi lain, RUU tersebut memiliki kekurangan, terutama karena tidak mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan dan perkawinan anak. Disisi lain, kritik mengenai hukuman mati Iran sebagai hukuman untuk pemerkosaan juga tetap menjadi masalah karena menghalangi perempuan untuk maju (Sharifi M. , 2021).

Pernyataan Founding Father Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. "Perempuan adalah separuh dari masyarakat; negara mana pun yang mengejar pembangunan tidak boleh meninggalkannya dalam kemiskinan atau buta huruf. Saya berada di pihak wanita; Saya selalu mengatakan demikian untuk menegakkan haknya untuk bekerja dan berpartisipasi dalam proses membangun negaranya" (Hinai, 2019). Pernyataan

ini merangkum satu inti realitas dunia Arab: media internasional sering melaporkan kasus-kasus penindasan dan penindasan yang ekstrem di wilayah ini, tetapi seringkali mengabaikan kemajuan yang telah dicapai untuk mencapai hak-hak perempuan yang lebih besar di beberapa negara. UEA, misalnya, yang menempati peringkat tertinggi dalam hal kesetaraan gender di Teluk, memiliki angkatan kerja wanita yang berkembang, termasuk posisi politik, dan proporsi wanita yang lebih tinggi daripada pria yang menghadiri institusi pendidikan tinggi, menurut *The Human Development Report 2018* – sebuah laporan yang disusun oleh Universitas Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peluncuran Dewan Keseimbangan Gender UEA pada tahun 2017 memainkan peran penting dalam memajukan partisipasi aktif perempuan Emirat dalam masyarakat, dan melalui sejarah UEA, status kewarganegaraan perempuan terus meningkat (Cookman, 2018).

Pada bulan Desember 2017, di tengah momentum #MeToo, Parlemen Mesir mengeluarkan undang-undang yang memberikan hak waris yang sama bagi perempuan laki-laki (Vogelstein, 2017). Mengamandemen undang-undang status pribadi tahun 1943 yang mengizinkan perempuan hanya setengah dari warisan harta milik laki-laki, dalam versi baru kebijakan ini, setiap individu yang mencoba untuk menolak bagian yang adil dari aset atau harta milik perempuan menghadapi hukuman penjara dan denda. Pemerintah Mesir memandang kebijakan ini sebagai pengubah permainan potensial dalam keadaan ekonomi perempuan Mesir. Bahkan, di tataran politik, 2017 ternyata menjadi tahun yang menentukan agenda hak-hak perempuan di beberapa wilayah, dengan beberapa kampanye hashtag yang menyertai upaya tersebut. Pada 26 September 2017, Arab Saudi mengumumkan deklarasi kerajaan untuk mengakhiri larangan pengemudi perempuan yang mulai berlaku pada Juni 2018 (Hubbard, 2017).

Penutup

Dari pemaparan diatas menunjukkan bagaimana negara-negara di MENA mengekspresikan gerakan Metoo dalam melawan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi disana. Di samping reformasi hukum, bertentangan dengan persepsi publik di banyak negara di Barat, perdebatan dan kontradiksi feminisme dan Islam masih hidup di sana. Gerakan #MeToo di MENA menunjukan framing seruan perubahan yang jauh lebih mendalam daripada perempuan yang mendapatkan akses ke peluang ekonomi atau

partisipasi politik. Melalui ini mereka berusaha untuk mengurangi pengaruh patriarki pada masyarakat, menghilangkan sikap menyalahkan korban, menempatkan tanggung jawab yang seharusnya pada pelaku.

Gerakan Me Too telah mempengaruhi dinamika sosial dan politik di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), di mana budaya patriarki dan tabu seputar kekerasan seksual masih kuat. Melalui tagar seperti #AnaKaman, #Masaktach, dan #MosqueMeToo, perempuan di wilayah ini mulai menantang norma sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan gender. Kontradiksi dalam feminisme di Timur Tengah mencerminkan pertempuran antara tradisi dan modernitas, agama dan budaya. Gerakan #MeToo di wilayah ini menghadapi tantangan khusus dalam menavigasi norma-norma sosial yang kuat dan mempengaruhi perubahan perilaku dan persepsi masyarakat.

Gerakan Me Too di MENA memunculkan diskusi tentang transformasi norma sosial, pembagian kekuasaan simbolik, dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, gerakan tersebut bertujuan untuk menghasilkan perubahan substantif dalam perlakuan terhadap kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender. Struktur sosial gerakan MeToo berkontribusi pada transformasi politik di MENA. Dalam beberapa kasus, seperti di UEA, Turki, Lebanon, Mesir, Iran, Yordania, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa keleluasaan di legislatif yang mendukung hak-hak perempuan, didukung oleh upaya online, dapat dicapai. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan amandemen, rancangan Undang-Undang dan pencabutan aturan yang selama ini merugikan pihak perempuan.

Dengan demikian, gerakan sosial Me Too di wilayah MENA tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga menantang struktur kekuasaan patriarki dan norma sosial yang membatasi kebebasan dan kesetaraan gender. Dengan menggunakan media sosial sebagai alat utama, gerakan ini telah menginspirasi perubahan dalam cara masyarakat memandang dan menanggapi isu-isu diskriminasi gender.

Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Abdelmonem, A. (2023). Egypt's #MeToo in the Shadow of Revolution: Digital Activism and the Demobilization of the Sexual Harassment Movement. Dalam L. H. Eltantawy, *The Palgrave Handbook of Gender, Media and Communication in the Middle East and North Africa* (hal. 188-208). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (2010). *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aljazeera. 2021. Tunisia's #MeToo: Landmark sexual harassment case kicks off. Diakses dari Aljazeera <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/29/tunisia-me-too-landmark-sexual-harassment-case-kicks-off>
- Aljazeera. n.d. Lebanon and The War on Journalist. Diakses dari Aljazeera <https://www.aljazeera.com/program/between-us/2023/12/21/lebanon-and-the-war-on-journalists>
- Amidi, F. (2018, February 9). Amidi, "100 Women: Muslim Women Rally Round #MosqueMeToo". Diakses dari BBC News: www.bbc.com/news/world-43006952
- BBC. (2014, January 2). Morocco Amends Controversial Rape Marriage Law. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/>
- Benamara, S. (2023). Uncovering Narratives: The Effects of Algerian Media and Legal System on Survivors of Domestic Violence. Dalam L. H. Eltantawy, *The Palgrave Handbook of Gender, Media and Communication in the Middle East and North Africa* (hal. 345-359). Switzerland: Springer Nature
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social movements: An Overview and Assessment . *Annual Review of Sociology* Vol. 26.
- Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On The Theoretical and Practical Existence of Groups. *Berkeley Journal of Sociology*, 32, 1-17.
- Bourdieu, P. (1997). *Outline of a theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Cookman, L. (2018, June 5). UAE ranks highest for gender equality in GCC, says Human Development Report. Diakses dari The National: www.thenational.ae/uae/uae-ranks-highest-for-gender-equality-in-gccsays-human-development-report-1.737261
- Daily Sabah. (2018, March 22). NevinYıldırım's life imprisonment sentence upheld in district retrial. Diambil kembali dari

<https://www.dailysabah.com/investigations/2018/03/22/nevin-yildirims-life-imprisonment-sentence-upheld-in-district-retrial>

- Dieter Opp, K. (2009). *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*. . Oxon: Routledge.
- Eltahawy, M. (2018). *Being Sexually Assaulted During Hajj*. . Diambil kembali dari [Twitter: https://twitter.com/monaeltahawy/status/960701491328712706?ref_src=twcamp%255Es](https://twitter.com/monaeltahawy/status/960701491328712706?ref_src=twcamp%255Es)
- Eltantawy, N. (. (2019, November 18). *Egypt, the Me Too Movement Is Falling Short*. Last Accessed November 5, 2021. . Diambil kembali dari Fair Observer: <https://www.fairobserver.com/culture/me-too-movement-sexual-harassment-egypt-middle-east-womens-rights-news-61521/>
- Fathi, N. I. (2020). *Iran's #Metoo Moment*. Middle East Institute (MEI). Diambil kembali dari <https://www.mei.edu/publications/irans-metoo-momen>
- Farouks, A. M. (2020). *Could Egypt's #MeToo movement be the tinder for a 'feminist revolution'?*. Diakses dari Reuters <https://www.reuters.com/article/idUSKCN26F1Y6/>
- Garcia, S. E. (2017, October 20). *The Woman Who Created #MeToo Long Before Hashtags*. Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/metoo-movement-tarana-burke.html>
- Ghazal, R. T. (2019). *The Struggle with the Stigma Associated with Rape*. Diambil kembali dari Arab News: www.arabnews.com/node/1428896
- Ghazal, R. T. (2021). *#ANAKAMAN — METOO IN THE ARAB WORLD A journalist's account*. Dalam G. Chandra, & G. Erlingsdóttir, *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE POLITICS OF THE #METOO MOVEMENT* (hal. 372-385). New York: Routledge.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on The Organization of Experience*. London: Harper and Row.
- Haddad, J. (2012). *Superman Is an Arab: On God, Marriage, Macho Men and Other Disastrous Inventions*. London: Westbourne Press.
- Harod, H. B. (2019). *#MeToo and the History of "Hashtag Feminism" in the MENA Region*. Diambil kembali dari European Institute of Mediterranean: <https://www.iemed.org/publication/metoo-and-the-history-of-hashtag-feminism-in-the-mena-region/>

- Hinai, M. A. (2019, March 7). The UAE's Empowerment of Women is an Example for the World to Follow Entrepreneur. Diambil kembali dari Entrepreneur Middle East: <https://www.entrepreneur.com/en-ae/women-entrepreneur/the-uaes-empowerment-of-women-is-an-example-for-the-world/329624>
- Hubbard, B. (2017, September 26). Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive. Diambil kembali dari The New York: www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/saudi-arabia-women-drive.html
- Hussein, W. (2016, July 11). Inheritance plan could be game-changer for Egyptian Women. Diambil kembali dari Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/originals/2016/07/egypt-inheritance-rights-women-disputes-courts.html>
- Jenkins, C. J, and Klandermans, Bert, eds. (2005). *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*. London: UCL Press.
- Joshan, M. (2024). *#MeToo Movement in Iran: From Self-blame to Sisterhood*. Ottawa: University of Ottawa.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (2004). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miller, S. (2018, March 30). Focus On: Honor Killings in Jordan. Diambil kembali dari Diplomatic Envoy: <https://web.archive.org/web/20180902172735/http://thediplomaticenvoy>
- Mutoka, L. M. (2023). *Women's Movement Emergence in the MENA region: A Gendered Analysis of the Outbreak of the 2020 #MeToo Movement in Egypt*. Netherlands: Universitet Leiden .
- Rachidi, S. (2018, September). #MeToo Movement Clashes with Arab Patriarchy. Diambil kembali dari Inside Arabia: <https://insidearabia.com/metoo-movement-clashes-arab-patriarchy/>
- Saadawi, N. E. (2011). Nawal El Saadawi Interview. Diambil kembali dari The Progressive: <https://progressive.org/magazine/nawal-el-saadawi-interview/>
- Sadek, G. (2017, August 8). Jordan: Repeal of Controversial Article in Penal Code. Diambil kembali dari Law Library of Congress:

<https://www.loc.gov/research-centers/law-library-of-congress/about-this-research-center/>

- Sharifi, M. (2021). #MeToo in MENA: The women shaking the region out of its silence on sexual harassment. Diambil kembali dari The New Arab: <https://english.alaraby.co.uk/features/mena-women-shake-region-out-sexual-harassment-silence>
- Sharifi, M. (2021, October 22). #MeToo in MENA: The women shaking the region out of its silence on sexual harassment. Diambil kembali dari The New Arab: <https://english.alaraby.co.uk/features/mena-women-shake-region-out-sexual-harassment-silence>
- Singh, R. (2001). *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*. New Delhi: SAGE publikations India, Ltd.
- Soerjasih, I., Kinasih, S. E., Anggaunitakiranantika, & Haryono, T. (2017). *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan: Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sunstein, R. C. (2021). #Me Too as a Revolutionary cascade. Dalam G. C. Erlingsdóttir, *THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF THE POLITICS OF THE #METOO MOVEMENT* (hal. 42-54). New York: Routledge.
- Swartz, D. (1997). *Culture and power: The sociology of Pierre Bourdieu*. University of Chicago .
- Thomson Reuters Foundation. (2017). Most Dangerous Megacities for women: 2017. Diambil kembali dari Reuters: <https://news.trust.org/item/20171018091429-v25y4>
- UN Women. (2019). A Hashtag for Women from the Arab States. . Diambil kembali dari UN Women | Arab States: <https://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2019/2/a-hashtag-for-women-from-the-arab-states>
- UN Women. (2020). #MeToo: Headlines from a global movement. Diambil kembali dari UN Women : <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/brief-metoo-headlines-from-a-global-movement>
- UN Women. (t.thn.). Tunisia Passes Historic Law To End Violence Against Women And Girls. Diambil kembali dari UN Women :

www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women

- Vogelstein, R. B. (2017, December 15). Women Around the World: This Week. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: www.cfr.org/blog/women-around-world-week-107?sp_mid=55581567&sp_rid=aGVpZGlAd29tZW5zdm9pY2Vzbn93Lm9yZwS2
- Vogelstein, R. B. (2018, November 5). Women This Week: Morocco's #MeToo Moment. Diambil kembali dari Council on Foreign Relation: <https://www.cfr.org/blog/women-week-moroccos-metoo-moment>
- Wacquant, L., & Akçaoğlu, A. (2016). Practice and symbolic power in Bourdieu: The View from Berkeley. ., *Journal of Classical Sociology*, 17(1), 55–69.
- Willows, E. (2018). Social Media and sexual assault: The impact of rape myths on constructions of sexual assault on Twitter (thesis).
- Yaman, M. (2018, February). Is it OK to Say '#MeToo' in Turkey? Diambil kembali dari Humanity Action: https://humanityinaction.org/knowledge_detail/is-it-ok-to-say-metoo-in-turkey/?lang=bs